

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kurikulum, bukan kata yang asing dalam dunia pendidikan. Pendidikan atau pembelajaran tidak lepas dari istilah ini, karena kurikulum adalah salah satu komponen dari pembelajaran. Dengan adanya kurikulum proses belajar dan pembelajaran akan berjalan secara terstruktur dan tersistem demi mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pengembangan kurikulum menjadi sangat penting sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan perubahan pada masyarakat.

Mencapai tujuan mulia dari pembelajaran tersebut, maka para pengembang kurikulum terus berbenah dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang diberlakukan. Sebagaimana yang akan dibahas di makalah ini, kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini bertujuan tidak lain untuk lebih memperbaiki kualitas pendidikan yang ada saat ini.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam segala aspek perkembangan diri manusia. Pembentukan karakter yang baik serta wawasan yang luas menjadi sorotan utama fungsi pendidikan. Begitu banyak macam pendidikan yang telah ditanamkan sejak dini mulai dari bidang sosial, keagamaan dan eksakta. Dalam mewujudkan tercapainya fungsi pendidikan tersebut, pendidikan di Indonesia dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat atas memiliki rancangan pendidikan yang disebut kurikulum.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab I pasal 1 ayat 19 berbunyi: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan yang tak lain memiliki tempat yang strategis dalam pewujudannya, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa memahami konsep dasar kurikulum sehingga penyempurnaan kurikulum terus berkembang. Seiring dengan meluasnya intelektualitas dan tuntutan zaman, tuntutan ilmu juga berkembang pesat dan akhirnya kurikulum mengalami sebanyak 10 kali pergantian hingga sekarang. Hal ini membuat siswa harus beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru.

Dalam meninjau keberhasilan kurikulum, salah satu cara yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan adalah diadakannya ujian akhir sebagai evaluasi hasil belajar yang disebut ujian nasional. Ujian nasional dilakukan serempak oleh para siswa di seluruh pelosok negeri dan mempunyai standar nilai minimal kelulusan. Hasil ujian akhir menjadi penentu kelulusan dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberlanjutan pendidikan siswa untuk tingkat pendidikan yang lebih atas. Tuntutan ilmu yang semakin berkembang sehingga kurikulum berubah mengikuti kebutuhan zaman dan standar kelulusan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan produk undang-undang pendidikan pertama pada awal abad ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pendidikan nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter.

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman.

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum, yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Penelitian ini menfokuskan kompetensi sikap dalam implementasi kurikulum 2013. Penanaman sikap tanggung jawab sosial sangatlah penting dalam mengembangkan nilai moral yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Karena peserta didik yang terbiasa bertanggung jawab pada lingkungan sosial, dimasa yang akan datang diharapkan dapat bergaul, berkomitmen terhadap janji, memenuhi kewajiban yang dimiliki, taat terhadap peraturan, menghormati nilai dan norma sosial, aktif dalam kegiatan sosial, dan tidak terbawa dalam beberapa kasus pidana maupun perdata yang merugikan dirinya maupun lingkungan sosial sekelilingnya. Namun harapan tersebut kini kian berkurang dikarenakan beberapa kasus yang dilakukan oleh sebagian peserta didik yang mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab sosial.

Kasus yang mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab sebagaimana dilansir oleh Sugiarto "Tawuran Pelajar, Clurit Siswa Hingga Tewas. Tiga orang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Semarang Terancam 12 Tahun Penjara" (Tribunnews jum'at, 27 April 2018). Oleh Dewi Agustina

“Seorang Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Tersangka Pengedar Sabu-sabu Ikut Ujian Nasional di Sekolahnya” (Tribunnews. Senin, 2 April 2018). Oleh Choirul Arifin “Modus Pinjam dengan Jaminan SIM, Pelajar SMA Depok Jadi Korban Pencurian Motor” (Tribunnews. Minggu, 14 Januari 2018).

Menanggapi beberapa kasus pelanggaran sosial dan moral yang terjadi di Indonesia seperti contoh kasus diatas, disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam pentingnya sikap bertanggung jawab sosial, sampai saat ini pemerintahpun telah mencoba beberapa solusi dalam menghadapi beragam permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya seperti pendidikan karakter yang baru lima tahun terakhir di angkat sebagai upaya mencetak dan memperbaiki kualitas moral bangsa bangsa.

Pendidikan karakter merupakan sebuah pembahasan yang berawal dari pendapat kementerian pendidikan dalam memperingati hari Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 dan terus di kembangkan sampai saat ini tahun 2018. Sejak tahun 2010 banyak ahli pendidikan, pengamat pendidikan, dan praktisi pendidikan mencoba menterjemahkan pendidikan karakter menurut versinya masing-masing. Karena permasalahan dalam dunia pendidikan selalu ada dalam sepanjang tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh di setiap permasalahan yang ditemukan. Lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi berlomba untuk menterjemahkan pendidikan karakter itu dalam lembaganya masing-masing.

Sekolah mencirikan pendidikan karakter dengan pendidikan budipekerti. Sedangkan perguruan tinggi melakukan kajian-kajian ilmiah dan mendalam

tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan karakter dalam praksis pendidikan.

Praksis pendidikan yang paling disoroti ketika mulai disahkannya Kurikulum 2013 pada bulan juli 2013 dan terus dikembangkan adalah Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) mulai dari penetapan kompetensi inti yang diharapkan setiap mata pelajaran di suatu lembaga pendidikan haruslah memiliki *output* (hasil) yang mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kaya akan pengetahuan dan memiliki beragam keterampilan. Empat kompetensi inti tersebut di serahkan pada mata pelajaran Agama dan PPKn, atas dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki Undang-undang yang mengatur segala yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Salah satunya adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (3) memberikan perhatian khusus dalam membentuk kepribadian peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar bahwa kurangnya kepedulian sosial siswa dengan teman, kurang peka terhadap lingkungan, kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar siswa. Selain itu, masih banyak siswa yang saling bermusuhan dengan siswa lain, tidak mengetahui ada teman yang sedang sakit atau tidak berangkat sekolah, tidak meminjamkan pensil kepada teman yang

tidak membawa, sulit menyesuaikan diri dengan teman, ingin menang sendiri, saling berebut ketika sedang bermain, dan dalam berteman masih suka memilih-milih sehingga ketika bermain hanya bersama gang/ kelompoknya. Pada proses pembelajaran berlangsung mereka masih saling mengejek dan menertawakan jika ada siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan guru.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik membuat sebuah penelitian yang berjudul penelitian “Implementasi Kurikulum 2013 pada Penanaman Sikap Sosial di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar Tahun 2018.”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 pada penanaman sikap sosial di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar Tahun 2018?”, maka permasalahan yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimana perencanaan penanaman sikap sosial siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar tahun 2018?
2. Bagaimana pelaksanaan penanaman sikap sosial siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar tahun 2018?
3. Bagaimana evaluasi penanaman sikap sosial siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar tahun 2018?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Perencanaan penanaman sikap sosial siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar tahun 2018.
2. Pelaksanaan penanaman sikap sosial siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar tahun 2018.
3. Evaluasi penanaman sikap sosial siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karanganyar tahun 2018.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari, sebagai acuan dalam pembelajaran kurikulum 2013 dalam rangka penanaman sikap sosial.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi kepala sekolah Sekolah, dapat dijadikan acuan melakukan pembinaan terhadap guru dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013, terutama berkaitan dengan sikap sosial anak.
- b. Bagi guru, agar melakukan implementasi kurikulum 2013, terutama berkaitan dengan sikap sosial anak
- c. Bagi peneliti, agar diperoleh gambaran pelaksanaan implementasi kurikulum 2013, terutama berkaitan dengan sikap sosial anak.